

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Majunya suatu daerah dapat dilihat bagaimana kemakmuran yang ada pada daerah tersebut, selain itu bisa dilihat seberapa banyak pertumbuhan masyarakat disuatu daerah. Kemiskinan dan memiliki kehidupan yang layak merupakan keinginan seluruh masyarakat yang berada disuatu daerah.

Indonesia sebagai negara berkembang masih perlu membenahi diri, mulai dari peningkatan taraf hidup hingga memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia sendiri masih harus menghadapi kasus seperti gelandangan dan pengemis. Tingkat urbanisasi yang tinggi serta tidak meratanya pembangunan bisa menyebabkan pengangguran dan kemiskinan pada suatu daerah.

Masalah kemiskinan saat ini masih menemui jalan buntu dalam pemecahannya. Pemerintah sebagai pembuat keputusan masih tidak mampu untuk membuat penanganan dalam masalah kemiskinan itu sendiri. Tidak didukung oleh mental masyarakat yang bagus untuk memberi perubahan terhadap kemiskinan itu juga menjadi faktor sendiri pemecahan masalah kemiskinan tidak mendapat jalan keluar. Angka kemiskinan tinggi dapat menciptakan para pengemis dan gelandangan yang hadirnya mereka mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Menurut Ruslan Malik dan Anwari WMK menyebutkan bahwa¹ :

“Upaya kolektif pengentasan kemiskinan berada dalam dua aras. Pada aras pertama kemiskinan yang menerpa sebuah keluarga dimaknai sebagai kemiskinan kolektif sehingga pengentasannya pun mustahil dilakukan parsial hanya dengan, misalnya membaca kondisi sosial ekonomi kepala keluarga. Seluruh elemen dalam sebuah keluarga miskin niscaya untuk dientaskan dari kemiskinan melalui treatment khusus sesuai dengan posisi masing-masing anggota keluarga. Pada aras kedua kelembagaan yang memikul tanggung jawab pokok pengentasan kemiskinan bekerjasama dengan kelembagaan lain dalam masyarakat untuk melakukan sebuah treatment secara spesifik. Maka upaya kolektif pengentasan kemiskinan merupakan perjuangan menghapuskan yang bersifat multidimensional”.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian, apabila tidak ada penanganan dalam pengangguran maka pengangguran dapat tumbuh semakin hari semakin meluas. Hal ini dapat memberi dampak negatif kepada individu masyarakat dan masyarakat secara umum².

Masalah lain dari kemiskinan yaitu semakin banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis, gelandangan dan pengemis masyarakat yang disebabkan kualitas hidup yang masih dibawah garis kemiskinan dan juga sebagai tolak ukur suatu Negara, apakah Negara tersebut sudah maju dan terbebas dari kemiskinan³

¹Ruslan Malik dan Anwar WMK dalam Ariya Akbarin, “Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) di Panti Sosial Binakarya Yogyakarta”, skripsi, Yogyakarta 2015,

² <https://anantalia19.wordpress.com/2013/02/21/dampak-pengangguran/> diakses tanggal kamis 06 oktober 2016.

³Ariya Akbarin, “Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) di Panti Sosial Binakarya Yogyakarta”, skripsi, Yogyakarta 2015,

Tabel 1.1
Kemiskinan Kota Yogyakarta

Variabe kemiskinan	Kemiskinan kota Yogyakarta							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GarisKemiskinan (Rp/Kap/Bln)	265.165	290.286	314.311	333.232	353.602	366.520	383.966	401.193
JumlahPenduduk Miskin (dalam 0000)	45,30	37,80	37,70	37,40	35,60	35,60	36	32,06
Persentase Penduduk Miskin	10,05	9,75	9,62	9,38	8,82	8,67	8,75	7,70
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,91	1,26	1,19	1,57	1,24	1,14	1,06	1,05
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,58	0,36	0,24	0,37	0,27	0,26	0,23	0,19

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Jakarta adalah contoh kota besar yang sering dijadikan masyarakat desa untuk mencari pekerjaan. Pandangan masyarakat tentang jakarta tidak berubah, banyak dari mereka melirik Jakarta adalah sebuah tempat yang menggiurkan untuk memperoleh penghasilan⁴. Namun banyak dari mereka yang memilih menjadi pengemis karena penghasilan yang melimpah bahkan dalam sehari pengemis bisa mendapatkan penghasilan sekitar 750 ribu sampai dengan satu juta rupiah⁵.

Selain Jakarta kota-kota besar lain juga sering dijadikan orang-orang untuk melakukan urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menaikkan taraf hidup mereka. Yogyakarta merupakan contoh lain dari salah satu kota besar yang banyak dijadikan orang

⁴Bambang Giyanto, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus Jakarta)", Borneo Administrator, vol 4 no 2,

⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/penghasilan-pengemis-di-jakarta-lebih-besar-dari-manajer.html> diakses tanggal Selasa 04 Oktober 2016

untuk berurbanisasi. Dari data yang didapatkan pertumbuhan masyarakat Kota Yogyakarta merupakan yang paling cepat perkembangannya, setiap 1 km² Kota Yogyakarta dihuni oleh 11.958 jiwa⁶. Profile kota Yogyakarta yang terkenal dengan pariwisata dan kebudayaannya menjadi magnet tersendiri untuk para gelandangan dan pengemis datang berbondong ke Yogyakarta⁷.

Angka kunjungan wisata Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan⁸. Pada tahun 2010 ada sekitar 1.456.980 pengunjung. Setiap tahun mengalami peningkatan sampai pada tahun 2012 pengunjung wisata di Yogyakarta mencapai 2.360.173 wisatawan⁹. Dengan angka wisatawan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, menyebabkan keinginan para gelandangan dan pengemis untuk terjun ke jalanan guna mencari nafkah dengan cara meminta-minta.

Gelandangan dan pengemis di Yogyakarta mengalami peningkatan pada saat tertentu, seperti masa liburan lebaran sampai sekitar bulan Ramadhan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinsos DIY dalam wawancara bersama tribunnews.com¹⁰. Namun hal berbeda dialami oleh Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta mengalami penurunan gelandangan dan pengemis, sesuai dengan data dari Dinas Ketertiban jumlah gelandangan yang terjaring penjangkauan pada 2010

⁶ Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014

⁷ Ariya Akbarin, "Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) di Panti Sosial Binakarya Yogyakarta", skripsi, Yogyakarta 2015,

⁸ Aliyah Nur Munjiah, "Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis, skripsi, Yogyakarta, 2015,

⁹ Buku Ringkasan Statistik Pariwisata Dinas Pariwisata Yogyakarta 2012

¹⁰ <http://www.tribunnews.com/regional/2016/06/13/selam-ramadan-jumlah-gelandangan-dan-pengemis-di-diy-meningkat> diakses tanggal 6 april 2017

sebanyak 897 jiwa, lalu di tahun 2011 sebanyak 451 jiwa, lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2012 yaitu sebanyak 274 jiwa¹¹.

Untuk menanggulangi dan melakukan penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. Dalam Perda nomor 1 tahun 2014 upaya pengendalian sosial ini dapat di jabarkan sebagai berikut :

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2014. Dalam perda tersebut juga menjelaskan klasifikasi gepeng itu sendiri. Gelandangan dan pengemis dibagi menjadi tiga klasifikasi menurut Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Yogyakarta, yang pertama merupakan gelandangan, dimana gelandangan merupakan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum. Gelandangan sering kita jumpai diberbagai ruas jalan, tidak terkecuali di Yogyakarta sendiri. Kedua pergelandangan, pergelandangan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para gelandangan, pada intinya pergelandangan merupakan tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh gelandangan. Ketiga gelandangan psikotik dan pengemis, dimana gelandangan psikotik adalah gelandangan yang memiliki keterbelakangan

¹¹ <http://www.antarayogya.com/print/307241/jumlah-gelandangan-di-yogyakarta-cenderung-turun> di akses selasa, 26 juli, 2017

mental, sedangkan untuk pengemis merupakan orang yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta dan mengharapkan belaskasih dari orang lain.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Penanganan adalah suatu Proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial. *Preventif* adalah usaha terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan pemberian tindakan lanjut serta pemberian bantuan kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan dan pengemis. *Koersif* adalah upaya atau tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial. *Rehabilitatif* adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi, ataupun ketengah-tengah masyarakat. *Reintegrasi Sosial* adalah upaya proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Terbitnya Perda no 1 tahun 2014 ini menandakan keseriusan pemerintahan DIY dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Yogyakarta. Dinas sosial berkerjasama dengan Panti karya guna menanggulangi tingkat gelandangan dan pengemis di Yogyakarta dengan memberikan pelatihan-pelatihan tertentu.

Unit Pelayanan Terpadu Panti Karya ini memberikan pembinaan kepada seluruh orang yang sudah hidup di jalanan¹². Melalui UPT inilah Dinas sosial memberikan penanganan tanggap kepada seluruh anak jalanan gelandangan dan pengemis. Menurut dinas sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis harus diberikan penanganan yang tepat agar tidak lagi ketergantungan terhadap jalanan.

Faktor penghambat apa dan bagaimana implementasi perda nomor 1 tahun 2014 ini sebagaimana yang diberlakukan untuk menanggulangi pengemis dan gelandangan namun dalam faktanya tingkat perkembangan pengemis malah semakin luas apalagi menjelang hari-hari besar dan libur nasional.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Yogyakarta ?*
- 2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang gelandangan dan pengemis ?*

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui identifikasi Peraturan daerah Yogyakarta terhadap aktivitas pemusik tradisional

¹²<http://www.jogjakota.go.id/news/Setiap-Masalah-Sosial-Kami-Punya-Solusinya> diakses Kamis 06 Oktober 2016

2. Untuk mengetahui sejauh mana Peraturan daerah Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 menangani keberadaan pemusik tradisional.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi tentang implementasi kebijakan publik

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam memahami implementasi kebijakan publik.

1.4. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

Pada dasarnya kebijakan publik merupakan sebuah aturan atau tanggapan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan publik. Pembahasan mengenai definisi kebijakan publik dapat dilihat dalam beberapa definisi menurut para ahli ini. Chandler dan Plano mendeskripsikan pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah kebijakan publik merupakan suatu intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kelompok yang kurang beruntung

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas¹³.

Anderson mendefinisikan mengenai kebijakan publik, dimana kebijakan publik merupakan aturan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat pemerintah, Kebijakan publik juga dapat diklasifikasikan dalam proses management dimana di dalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah bertindak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat¹⁴. Implikasi yang biasa terjadi dari penerapan kebijakan menurut Anderson ialah adanya sifat memaksa dari kebijakan-kebijakan dan setiap kebijakan yang dibuat selalu berorientasi kepada tujuan tertentu.

Charles O Jones juga mendefinisikan tentang kebijakan publik. Jones memandang bahwa kebijakan publik merupakan upaya tindak lanjut dari pemerintah sebelumnya yang diubah sedikit demi sedikit¹⁵. Tindak lanjut di sini merupakan klaifikasi dalam *decision making* dimana pemerintah membuat suatu aturan tertentu yang digunakan untuk menintervensi rakyatnya ketika terdapat efek dari program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan di masyarakat.

2. Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam suatu daerah. Lembaga

¹³ Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam *Kebijakan Publik*

yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003

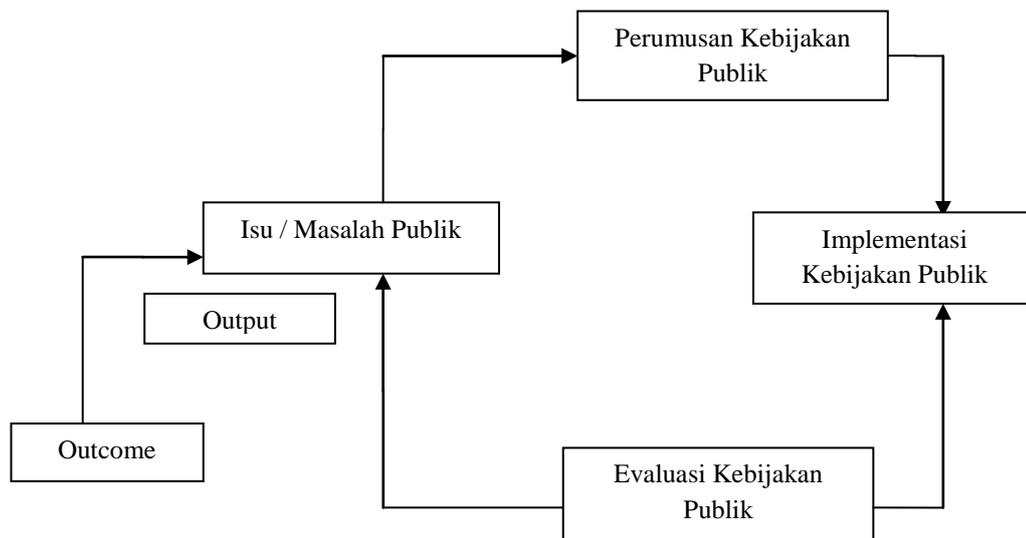
¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

publik merupakan lembaga yang didanai dari uang publik yang berbentuk retribusi yang dipungut secara kolektif dari publik.

Gambar 1.1

Skema Proses Kebijakan



Dari alur skematik diatas dapat dijelaskan dalam skkuensi sebagai berikut¹⁶ :

- a. Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh seseorang dan memang harus diselesaikan.
- b. Isu ini diangkat sebagai isu politik yang memang harus diselesaikan.
- c. Isu ini diangkat sebagai agenda politik yang harus diselesaikan isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini

¹⁶ Rian Nugroho. *Public Policy*. PT Elek Media Komptindo. Jakarta. 2009.hal 74

akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pemimpin negara.

- d. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- e. Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan adanya tindakan evaluasi guna untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan berjalan dan di implementasikan dengan baik dan benar.
- f. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri bermanfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- g. Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impact. Impact tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang hendak di capai oleh kebijakan yang dirumuskan.

3. Jenis Kebijakan

Setiap jenis isu kebijakan memerlukan respon kebijakan tertentu, karenanya kebijakan publik mempunyai berbagai-bagai jenis¹⁷. Anderson dalam Rita Damayanti, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta* memperomosisikan :

¹⁷ Rita, Damayanti, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014*, skripsi, Yogyakarta 2016

a. *Constituent*

Kebijakan *constituent* jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan Negara termasuk didalamnya kebijakan tentang keamanan Negara.

b. *Regulatory*

Kebijakan *regulatory* adalah kebijakan yang berkenaan dengan alokasi layanan atau manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi.

c. *Self regulatory*

Kebijakan *self regulatory* hampir sama dengan *regulatory*, hanya kebijakan dirumuskan oleh para pelakunya.

d. *Redistributive*

Kebijakan *redistributive* berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan, atau hak hak dari kelompok tertentu dimasyarakat, yaitu kelompok kaya atau sejahter, kekelompok lain, yaitu kelompok miskin atau kekurangan.

4. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa warga negara mendapat akses terhadap pelayanan sosial dasar¹⁸. Pelayanan dasar sosial seperti pajak, kesehatan pendidikan sampai dengan perumahan merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial.

¹⁸ Dermawan triwibowo dan Nur iman s, *Meretas Arah Kebijakan Baru di Indonesia*, Jakarta 2009

Dalam kebijakan sosial, beberapa hal yang selalu mencakup didalamnya adantara lain¹⁹ :

1. Berbagai skema perlindungan sosial (*Social Protection*), baik yang berbasis asuransi private maupun jaminan sosial publik bagi pekerja dan keluarganya.
2. Berbagai skema bantuan sosial (*Social assistance*), yang berguna bagi masyarakat miskin dan rentan, bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai ataupun nontunai.
3. Berbagai macam tunjangan universal (*Universal benefit*) yang diberikan pada seluruh warganya.

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan²⁰.

1. Peraturan dan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
2. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial.

¹⁹ Ibid

²⁰ Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung 2008 Hal 11

3. Sistem perpajakan. Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber-sumber pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial pada dasarnya jarang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, kebijakan sosial lebih kasat mata, kebanyakan susah jika harus dibedakan dengan kebijakan publik²¹.

1.4.2. Implementasi Kebijakan

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Sejarah berkembangnya implementasi awalnya dimulai sekitar tahun 1970-an, karya yang dianggap mengawali studi tentang implementasi ialah tulisan pressman dan Wildavsky “Implementation” pada tahun 1973²². Tulisan tersebut membahas mengenai implementasi program pembangunan ekonomi perkotaan di Aucland USA.

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan publik, dimana implementasi kebijakan akan memberikan implikasi dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.

adanya prosedur organisasi yang standard (*standar operating procedure*). Atau biasa disebut juga dengan SOP. Standar pelayanan menjadi perdoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu

²¹ www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.ppd diakses tanggal 17 desember 2016

²² https://www.academia.edu/10123441/BAB_III_PENDEKATAN_DAN_TEORI_TEORI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK diakses selasa 18 oktober 2016

panjang cenderung akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel²³.

2. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul dilapangan. Implementasi juga memiliki ancaman yang utama yaitu konsistensi Implementasi²⁴.

Model implementasi yang dijabarkan berikut adalah model Van meter dimana Van meter dan horn mendefinisikan bahwa implemmentasi kebijakan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik²⁵. Faktor yang mempengaruhi kebijakan publik antara lain, karakteristik agen pelaksanaan implementator, kondisi ekonomi, kecenderungan (*dispotition*) pelaksanaan implementator.

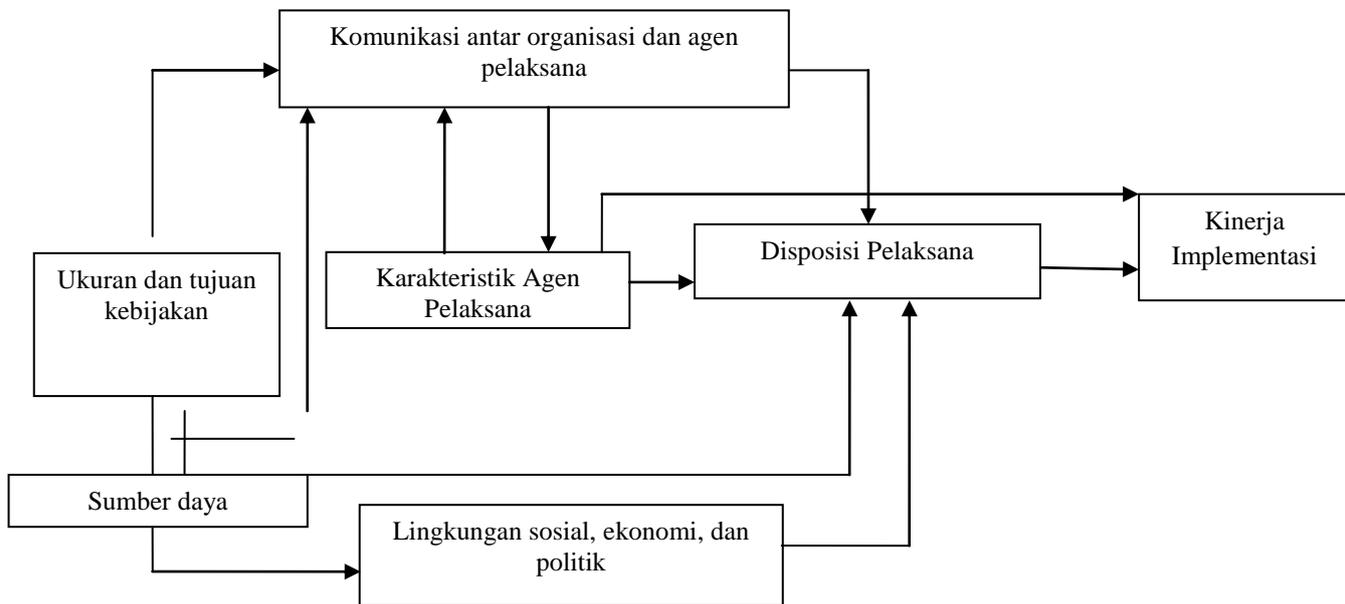
²³ Akib H, *Implementasi kebijakan publik (apa, mengapa, dan bagaimana)*, makassar 2010

²⁴ Rian Nugroho. *Public Policy*. PT Elek Media Komptindo. Jakarta. 2009. Hal 681

²⁵ Ibid hal 503

Gambar 1.2

Model Van Meter dan Van H

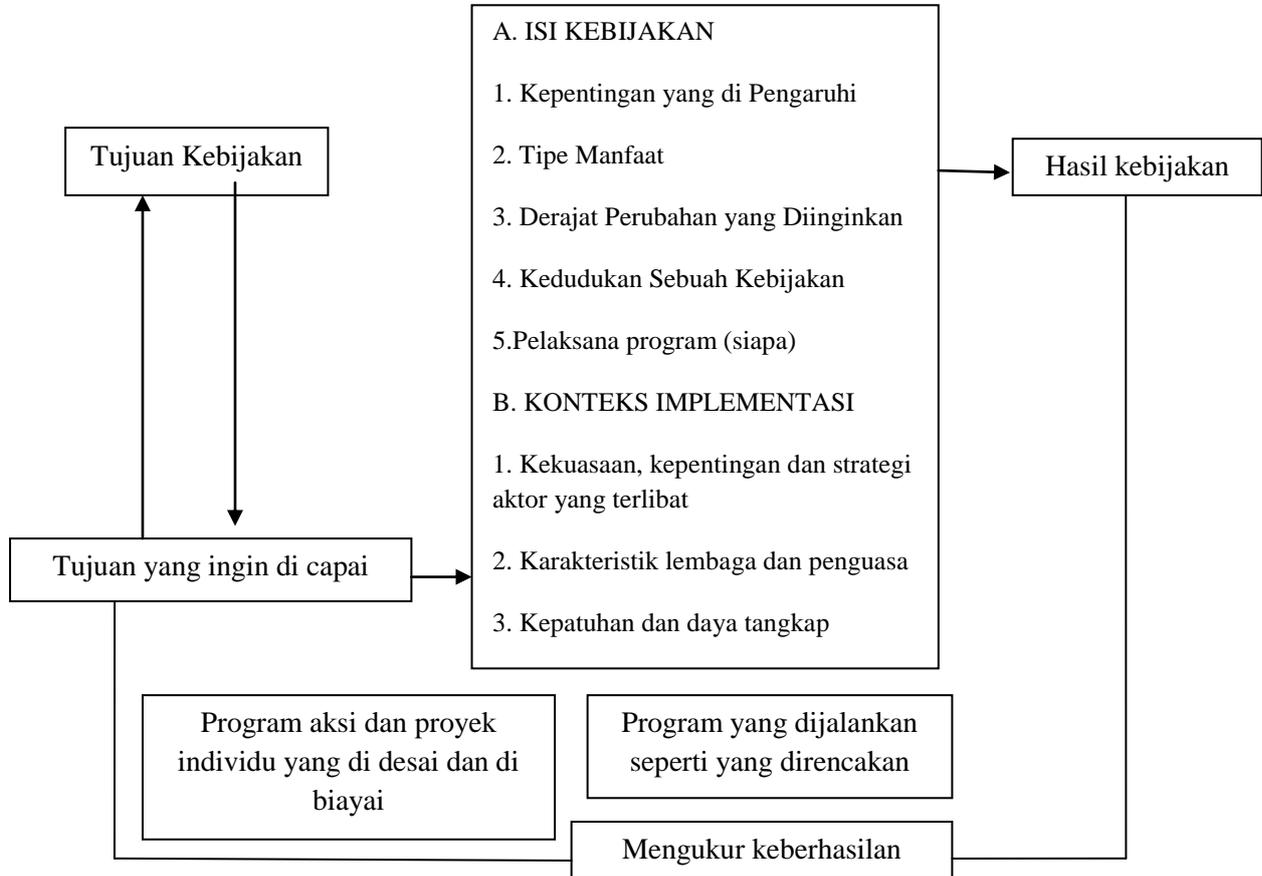


Van meter yang mengemukakan tentang bentuk implementasi kebijakan berupa garis linear yang saling mempengaruhi beberapa karakteristik. Menurut Grindle Implementasi kebijakan ditemukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan tersebut²⁶.

²⁶ Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994

Gamabr 1.3

Model Pendekatan Menurut Grindle



Grindle yang menjelaskan bahwa keberhasilan dari model implementasi yang dijabarkannya yaitu berdasarkan *Implmentabilitynya*, berbeda dengan Model Edward. George C. Edward menjelaskan model *direct and impact on implementation* dimana dalam pendekatan ini Edward menerapkan empat variabel yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi²⁷

²⁷ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012 hal 149

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu²⁹

²⁹leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012 hal 151

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf, karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak,

efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias³⁰.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat-pejabat tinggi. Karena itu,

³⁰ Igo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012 152

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik³¹.

Mazmania dan Paul A sbastier memiliki pemahaman sendiri tentang tercapainya suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah identifikasi variabel untuk mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh implementasi. Variabel yang dimaksud dapat dibedakan menjadi tiga yaitu ³² :

- a. Keberhasilan Implementasi akan ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan
- b. Struktur management program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Faktor-faktor di luar peraturan, faktor luar atau faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung pembuatan peraturan serta mmenjaga keseimbangan dukungan bagi tujuan yang tertmuat dalam keputusan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan lebih efektif jika birokrasi pelaksanaannya mematuhi peraturan yang telah dibuat, dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumberdaya.

Hogwood dan Gunn menjabarkan model lain dari implementasi kebijakan, para ahli lebih mengenal ,ode; Hoogwod dan Gunn sebagai “*The Top Down*

³¹ leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012 hal 153

³² Sholichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kabijakan Publik*, Balai Pustaka Jakarta, 1997, hlm 81

Approach”. Hoogwod juga menjabarkan bahwa suatu kebijakan agar terimplemtasi secara sempurna harus memnuhi beberapa syarat³³, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan instansi pelaksanaan tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang andal.
5. Hubungan kasualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Guna memperjelas faktor-faktor tersebut maka dibutuhkan satu model kebijakan untuk menyederhanakna pemahaman konsep implementasi kebijakan.

³³ Tachjan H, *“Implementasi Kebijakan Publik”*, AIPI Bandung, 2006, hlm 42

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan model kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Dimana Edward mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Selain itu implementasi memiliki banyak faktor untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan masing-masing faktor saling berinteraksi. Faktor-faktor itu adalah (1) faktor Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Selain itu alasan peneliti menggunakan teori Edward dikarenakan teori yang mudah di pahami, jelas, dan simpel sehingga teori yang digunakan sebagai penelitian mudah untuk dijalankan oleh peneliti

1.4.3. Aktivitas Gelandangan dan Pengemis

1. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah punya tempat kediaman tetap³⁴. Gelandangan pada dasarnya merupakan kelompok urbanisasi, kelompok ini tidak dibekali oleh kemampuan khusus dan spesialisasi tertentu sehingga kebanyakan kaum urbanisasi hanya mencari pekerjaan serabutan, seperti menjadi pengamen, pengemis, dan pemulung³⁵. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari

³⁴ Rohman Arief, *Program Penganganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga berorientasi Desa*, disampaikan pada acara Workshop *Penanganan Gelandangan di Perkotaan*, Jakarta 14 Oktober 2010, Kementerian Sosial RI

³⁵ Weinberg dalam Rohman Arief, *Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga berorientasi des*, disampaikan dalam workshop, jakarta 14 oktober 2010, kementerian sosial RI

meminta-minta di muka umum dengan berbagai berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang³⁶.

Gelandangan merupakan lapisan strata paling bawah diukur dari perekonomian, dan sosialnya. Maka dengan strata yang demikian gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai rumah dan pekerjaan yang layak dan teteap, berkeliaran di dalam kota, makan minum di sembarang tempat³⁷.

Gelandangan memiliki tiga gambaran umum yang dijabarkan oleh ahli³⁸, yaitu :

- 1). Sekelompok orang miskin yang dimiskinkan oleh masyarakatnya.
- 2). Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai.
- 3). Orang-orang yang berpola hidup akan mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Selain itu gelandangan juga memiliki definisi bermacam dari para ahli, Mapstone mendefinisikan gelandangan “..an inadequate experience of connectedness of family and or community”³⁹ makna yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan pengalaman namun memiliki keterhubungan antara keluarga dan komunitas.

McNeil, Guirguis, Dilley, Turnbull dan Hwang mengemukakan pendapat bahwa gelandangan memiliki beberapa golongan, golongan-golongan tersebut

³⁶ Iqbali, Saptono. *Gelndangan dan Pengemis di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem*, Jurnal vol 4 No 1 Juli 2008, Piramida

³⁷ Ibid

³⁸ Muthalib dan Sudjarwo dalam Iqbali Saptono, “*Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem*, Jurnal Vol 4 No 1 Juli 2008, Piramida

³⁹ Drani Syazwani, *Dinamika Gelandangan di Pulau Pinang*”, Diss, Universiti Sains Malaysia, 2016

terbagi atas, para gelandangan yang sudah kehilangan rumah atau tempat tinggal, tidak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, taraf hidup yang rendah, dan golongan yang tidak memiliki kemampuan sosial lagi sehingga berharap kepada orang lain untuk menopang kehidupan mereka⁴⁰.

Gelandangan dan pengemis atau biasa disingkat GEPENG, departemen sosial RI memberikan pengertian GEPENG sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu⁴¹.

1.5. Definisi Konsepsional

Berdasarkan kerangka teori diatas, akan dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian :

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang memberi batasan dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam

⁴⁰ Drani Syazwani, *Dinamika Gelandangan di Pulau Pinang*”, Diss, Universiti Sains Malaysia, 2016

⁴¹ Iqbali, Saptono. *Gelndangan dan Pengemis di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem*, Jurnal vol 4 No 1 Juli 2008, Piramida

suatu daerah yang dibangun oleh badan-badan atau pejabat pemerintah yang sifatnya mengikat masyarakat dan juga salah satu bentuk intervensi pemerintah melalui regulasi-regulasi yang telah diciptan.

3. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan yang sebelumnya telah dibuat dan disahkan dalam bentuk kebijakan untuk diwujudkan secara nyata sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menyangkut akademis administrasi maupun usaha yang memberikan dampak pada masyarakat.

4. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan berasal dari kata gelandang yang memiliki pengertian sebagian hidupnya di habiskan di jalanan, tidak dibekali oleh kemampuan khusus, tidak memiliki tempat tinggal, dan hidup berpindah-pindah.

1.6. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya adalah implementasi kebijakan dimana peneliti mengambil model implementasi yang dikemukakan oleh Edward. Model ini Edward III menyarankan untuk melihat empat isu pokok, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Dari keempat isu yang telah dikemukakan oleh Edward III dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan

penghambat dalam implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 terhadap gelandangan dan pengemis. Empat isu pokok yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Komunikasi

- a. Kebijakan ditransmisikan secara tepat dan benar.
- b. Petunjuk-petunjuk kebijakan dikomunikasikan secara jelas.
- c. Petunjuk instruksi kebijakan disampaikan secara konsisten.

2. Sumberdaya

- a. Adanya staff yang cukup dan sesuai klasifikasi atau berkompeten.
- b. Tersedianya informasi yang memadai terkait kebijakan.
- c. Adanya kewenangan yang dimiliki pelaksana kebijakan secara jelas.
- d. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

- a. Sikap pelaksana kebijakan dalam menghadapi Peraturan Perundang-undangan.

4. Struktur Birokrasi

- a. Adanya SOP yang jelas dan mudah dipahami.
- b. Adanya fragmentasi dengan pihak/instansi lain dalam pelaksanaan kebijakan.

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan beberapa unsur fundamental yakni latar belakang, rumusan masalah, dan perumusan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan dan dilampirkan diatas maka penelitian ini akan cukup relevan jika menggunakan jenis penelitian analisa kualitatif. Analisa Kualitatif merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang pokok pertanyaanya berkenaan dengan “how” (baagaimana) dan “why” (mengapa).

Analisa Kualitatif lebih digunakan untuk mengeksplorasi sikap, prilaku, dan pengalaman melalui metode wawancara atau *focus group*⁴². Metode ini mencoba untuk mendapatkan pendapat yang mendalam (*in-depht opinion*) para partisipan. Karena tingkah laku dan pengalaman lah yang penting, biasanya cuma ada lebih sedikit orang mengambil bagian dalam penelitian ini, tetapi hubungan atar peneliti dan partisipan lebih lama⁴³. untuk membedah peristiwa-peristiwa kontomporer, kekuatan yang menjadi pembeda dari studi kasus adalah potensi yang kuat untuk berhubungan secara keseluruhan dengan rangkaian berbagai jenis bukti, dokumen, peralatan, wawancara, dan observasi.

2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Pemerintahan Daerah Iatimewa Yogyakarta, dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Latar belakang masalah, permasalahan sosial di Yogyakarta kali ini harus menghadapi para gelandangan dan pengemis

⁴² Dawson Cathrine, *Metode Penelitian Praktis*, cetakan I, 2010 hal 15-16

⁴³ *Ibid* hal 16

yang berkeliaran setelah dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan Daerah Istimewa Yogyakarta dimana Perda tersebut mengatur tentang penertiban gelandangan dan pengemis yang ada di Yogyakarta.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan pokok konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini maka unit analisa akan dilakukan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dimana dinas bersangkutan dianggap tepat dan relevan dengan penelitian yang akan dijalankan dalam artian menjadi sumber utama observasi dan pengumpulan data yang akan diperoleh dari pegawai yang berwenang pada Dinas tersebut.

4. Jenis Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder data yang dimaksud adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti dengan melalui proses berupa wawancara dan hasil pengamatan langsung dilapangan. Sumber data utama ini diperoleh dari Dinas sosial yang menangani tentang gelandangan dan pengemis.

Tabel 1.2
Data Primer Peneliti

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pandangan tentang Peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 kota Yogyakarta	Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi ibu Chtri Maryatun	Wawancara <i>In-depht interview</i>
Tindak lanjut masalah penertiban Gelandangan dan Pengemis	Kepala seksi Advokasi dan Rehabilitasi ibu Nanik Trisnajayanti	Wawancara <i>In-depht interview</i>
Tindak lanjut masalah Peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis	Kepala seksi pengendalian oprasional bidang penegakan peraturan perundang-undangan Bapak Budi Santosa S. Ip.	Wawancara <i>In-depht interview</i>

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang dikutip oleh sumber lain melalui jurnal, buku, internet dan berbagai macam media yang dapat digunakan dalam perolehan data. Data tersebut digunakan untuk koheransi data primer yang kurang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang melalui penerapan kualitatif yang berisikan kutripan kata-kata untuk memberikan gambaran tentang penelitian lapangan. Dalam penelitian ini teknik yang efektif digunakan sebagai berikut :

a. Interview atau wawancara (*in-depht interview*)

wawancara atau interview menurut Eastberg adalah “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses resulting n communication and join constraction of meaning about a particular topic*”,⁴⁴ wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab pertanyaan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penggunaan wawancara sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana masalah yang diteliti oleh peneliti berlangsung.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara kepada Dinas sosial beserta pegawai yang bersangkutan dengan dasar implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dan bagaimana imbas dari implementasi itu.

b. Teknik Analisis Data

Ada tiga macam analisis data dalam kualitatif menurut Miles dan Huberman⁴⁵ :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pengolahan, pemfokusan dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Dalam artian reduksi data merupakan proses

⁴⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Juni 2014

⁴⁵ Miles dan Huberman dalam Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis data*, Depok, 2010 hal 129

pengumpulan data yang di lakukan secara berlanjut serta memfokuskan pada pola-pola, rangkuman data, yang kemudian di cari temanya.

2. Model Data (*Data Display*)

Model data adalah pengelompokan data yang dibuat oleh peneliti guna untuk memudahkan penelliti dalam pengambilan kesimpulan dan mengakses secara langsung data yang telah dielompokkan. Pengelompokan data bisa berupa, grafik-grafik, bagan-bagan, jenis matrik dan jaringan kerja.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di dapat ketika semua proses analisis data selesai dilakukan tahapan pertama sampai tahapan terkahir. Lalu data-data yang telah di verifikasikan akan diolah secara terus menerus sampai menemukan kesimpulan dari penelitian.